

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (SPSE) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN (Studi Pada Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Lampung)**

**Oleh**

**FIRLI SATRIAWAN**

Penelitian implementasi sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kebijakan tersebut diterapkan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Provinsi Lampung serta mengetahui hambatan-hambatan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan realita dalam implementasi kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi sistem pengadaan secara elektronik sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kelemahan ketika diukur dengan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari dimensi komunikasi diketahui bahwa proses pengadaan terjadi secara tidak langsung melalui media elektronik untuk menghindari intervensi proses pengadaan. Dari dimensi sumber daya, diketahui bahwa masih terdapat kekurangan kuantitas aparatur dan kemampuan aparatur dalam penguasaan sistem pengadaan secara elektronik. Dari dimensi disposisi diketahui bahwa komitmen penyelenggara sudah terlaksana dengan baik yang dibuktikan dengan penyelesaian seluruh paket lelang yang dibuka. Sedangkan dari dimensi struktur organisasi, penyelenggara telah mampu membentuk struktur yang baik dengan menempatkan aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tertata secara struktural. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa dibandingkan dengan penerapan pengadaan barang/jasa secara manual, implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik ini terbukti berhasil meningkatkan transparansi proses pengadaan barang/jasa, serta mampu meminimalisir kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kata kunci : Implementasi, SPSE, Transparansi

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC PROCUREMENT IN ORDER TO REALIZE TRANSPARENT GOVERNANCE**

**(Study in Departement of Procurement Services of Government Province of  
Lampung and Procurement Services Electronically of Government Province  
of Lampung)**

**By**

**FIRLI SATRIAWAN**

The research of electronic procurement system implementation (SPSE) is aimed to find out how far the policy is applied by Electronic Procurement Service (LPSE) of Lampung Province and the Agency for Procurement of Goods and Services (BLPBJ) Lampung Province and to know the obstacles in realizing the government that is transparent. This research uses descriptive research method with qualitative approach to describe reality in the implementation of procurement policy of goods / services electronically. The results of this study indicate that in the implementation of electronic procurement system is running well although there are still weaknesses when measured by the dimensions of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. From the communication dimension it is known that the procurement process occurs indirectly through electronic media to avoid procurement process intervention. From the dimension of resources, it is known that there is still a lack of quantity of apparatus and the ability of apparatus in procurement of electronic procurement system. From the dimension of the disposition, it is known that the organizer's commitment has been done well, as evidenced by the completion of all open auction packages. While the organizational structure dimension, the organizers have been able to form a good structure by placing the apparatus in accordance with the basic tasks and functions arranged structurally. From this research, it is concluded that compared to the implementation of procurement of goods / services manually, the implementation of procurement of goods / services electronically proved successful in increasing the transparency of the procurement process of goods / services, and able to minimize fraud in the procurement of goods / services government.

Keywords : Implementation, e-procurement, transparency.